

| | |
|--|--|
| | <p>Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi</p> |
|--|--|

1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Triwulan II Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2025 | Target Triwulan II 2025 | Realisasi Triwulan II | Capaian (%) |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| I | Sasaran Program 1. Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD | | | | | |
| 1.1 | Indikator 1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD | Persentase | 100% | 50% | 100% | 100%* 100%** |
| II | Sasaran Program 2. Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |
| 2.1 | Indikator 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN | Triliun (Rupiah) | Rp 1.905,60 Triliun | Rp 942,9 Triliun | Rp 942,9 Triliun | 100%* 49,5%** |
| III | Sasaran Program 3. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi | | | | | |
| 3.1 | Indikator 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi | Persentase | 82% | 45% | 45% | 100%* 55,4%** |
| IV | Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas | | | | | |
| 4.1 | Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | Indeks | 3 dari 4 | 1 dari 4 | 1 dari 4 | 100%* 33,3%* |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|----------|----------|----------|------------------|
| V | Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas | Indeks | 3 dari 4 | 3 dari 4 | 3 dari 4 | 100%* 100%** |
| 5.1 | Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | | | | | |
| VI | Sasaran Program 6. Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas | Persentase | 85% | 40% | 40% | 100%* 47,1%** |
| 6.1 | Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | | | | | |

Note:

- *= % capaian triwulan
- ** = % capaian tahunan

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD, di mana proses akses OECD Indonesia dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi Indonesia yang terdiri atas transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola melalui keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Dalam kerangka tahapan akses yang ditetapkan oleh OECD, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* merupakan bagian krusial dari proses awal akses setelah penyusunan peta jalan (*roadmap*).

Proses ini meliputi pelaksanaan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap kesesuaian kebijakan dan praktek Indonesia dengan standar dan instrumen OECD, serta penyusunan dokumen *Initial Memorandum* yang mencerminkan komitmen dan kesiapan Indonesia dalam proses menjadi anggota OECD. Pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri dan penyampaian dokumen tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur

kemajuan Indonesia dalam proses aksesi dan menunjukkan keseriusan serta kesiapan teknis dalam menjawab ekspektasi Komite OECD dalam tahap evaluasi teknis berikutnya.

Pencapaian sasaran strategis ini ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD

Latar Belakang

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD dalam mengawal proses awal aksesi Indonesia keanggotaan OECD. Indikator ini mencerminkan capaian pelaksanaan penilaian mandiri oleh kementerian/lembaga nasional terkait, penyusunan dokumen Initial Memorandum, serta penyampaiannya kepada Sekretariat OECD sebagai bentuk pemenuhan kewajiban substansial dalam tahapan aksesi.

Initial Memorandum merupakan penilaian mandiri awal yang disusun oleh Pemerintah Indonesia untuk menilai tingkat keselarasan peraturan perundang- undangan, kebijakan, dan praktik nasional dengan seluruh instrumen hukum OECD yang berlaku dan mengikat bagi negara-negara anggota. Instrumen hukum tersebut mencakup Keputusan, Rekomendasi, dan Pernyataan Substantif, serta Perjanjian atau Kesepakatan internasional yang dikembangkan dalam kerangka kerja OECD. Penilaian mandiri ini harus mencakup instrumen hukum yang telah diterapkan oleh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan proses aksesi, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional OECD, yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024 menetapkan struktur pelaksana Tim Nasional OECD, termasuk pembagian ke dalam 26 bidang sesuai dengan Peta Jalan Aksesi Indonesia. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertindak sebagai Sekretariat Tim Nasional OECD, dengan tanggung jawab utama mengoordinasikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan penilaian mandiri terhadap instrumen hukum OECD dan penyusunan dokumen Initial Memorandum.

Berdasarkan Peta Jalan Aksesi dan daftar instrumen hukum yang diterbitkan oleh Sekretariat OECD, terdapat 240 instrumen hukum yang harus dianalisis kesesuaianya dengan kebijakan dan regulasi nasional. Proses ini mencakup pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga, pengumpulan dan konsolidasi hasil asesmen, penyusunan dokumen Initial Memorandum, hingga pengorganisasian penyampaiannya kepada Sekretariat OECD.

Formula pengukuran:

$$Capaian = \frac{\text{Jumlah IM yang disampaikan ke Sekretariat OECD}}{\text{Total IM}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral. Adapun target triwulan sebesar 50% ditentukan berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk dapat menyampaikan Dokumen Initial Memorandum secara lengkap kepada Sekretariat OECD pada Triwulan II tahun 2025.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD yang mencapai target yang telah mencapai 10% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---|--------|--------|-----------|----------------------|
| IKU-1.1 Percentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD | Persen | 100% | 100% | 100 % (Memuaskan) |

Percentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD merupakan *direct cascading* dari indikator Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD. IKU ini ditargetkan sebesar 100% dan sampai dengan laporan ini disusun, persentase penampaian Dokumen IM kepada Sekretariat OECD telah mencapai 100%.

Penyerahan Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD

Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD telah menyerahkan dokumen Initial Memorandum aksesi OECD kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam Pertemuan Dewan Menteri OECD di Paris, Prancis, pada tanggal 3 Juni 2025. Penyerahan IM menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD, sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025- 2029

Penyusunan IM dilakukan di bawah koordinasi Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Nasional Aksesi OECD. Proses intensif ini melibatkan 64 kementerian/lembaga yang terbagi menjadi 26 Bidang. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 dan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024.

Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 Bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD.

Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu *technical review*.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi yang telah tercapai per Triwulan II adalah sebagai berikut:

| 1.1 Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penilaian Mandiri, Penyusunan, dan Penyampaian Dokumen Initial Memorandum kepada Sekretariat OECD | | | |
|---|---|---------------|--|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb) |
| 1. | Coordination Call dengan Deputy Director for Legal Affairs and The OECD Accession Coordinator | Terlaksana | Pada tanggal 9 April 2025 telah dilaksanakan coordination call dengan Ms.Gita Khotari, Deputy Director for Legal Affairs and The OECD Accession Coordinator |
| 2. | Coordination Call dengan OECD Secretariat | Terlaksana | Telah dilaksanakan pertemuan dengan Sekretariat OECD pada tanggal 14 Mei 2025 untuk membahas perkembangan penyusunan IM serta persiapan OECD MCM 2025 |
| 3. | Rapat Koordinasi Terbatas Progres Penyusunan Dokumen Initial Memorandum OECD | Terlaksana | Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian membahas progres penyusunan dokumen IM OECD pada tanggal 15 Mei 2025. Rapat memutuskan untuk segera menyelesaikan seluruh draft IM, khususnya untuk bidang-bidang yang memerlukan percepatan penyusunan |
| 4. | Rapat Koordinasi Teknis Finalisasi Initial Memorandum | Terlaksana | Telah dilaksanakan Rapat oleh Perwakilan K/L secara <i>hybrid</i> pada tanggal 26-27 Mei 2025. Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral bertujuan untuk memfinalisasi draft IM yang sudah mendapatkan masukan dari Sekretariat OECD |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Surat Menko Perekonomian hal Penunjukan sebagai Koordinator dan Anggota Bidang Tim Nasional OECD Indonesia tertanggal 20 April 2025
2. Pertemuan Bilateral dengan Sekretariat OECD dan Rapat Koordinasi Teknis dengan K/L Anggota Bidang, 5 Mei 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Initial Memorandum dan pertemuan-pertemuan lainnya secara virtual dan memanfaatkan ruang rapat di kantor. Proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp47.250.000. Hasil Efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan di TW II-IV.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

Adanya Instrumen OECD yang belum memiliki penanggung jawab untuk pelaksanaan asesmen dan penyusunan dokumen IM karena instrumen tersebut tidak secara jelas dicantumkan pada Peta jalan Aksesi OECD Indonesia. Atas dasar tersebut, Sekretariat Nasional OECD, menambahkan bidang beserta menunjuk kordinator dan anggota bidang dalam Tim Nasional OECD dengan mempertimbangkan keterkaitan substansi instrumen OECD dengan tugas pokok dan fungsi di Kementerian/Lembaga

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai

2

Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 2: Meningkatnya Investasi yang Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Nilai Realisasi PMA dan PMDN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| Nilai Realisasi PMA dan PMDN | Latar Belakang |
|------------------------------|--|
| | Meningkatnya Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor investasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, investasi mencakup Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). |

Pertumbuhan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi sangat krusial untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, mempercepat hilirisasi sektor unggulan, dan menstimulus pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan target nilai realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 Triliun pada tahun 2025, pemerintah mengharapkan peningkatan signifikan dalam penanaman modal baik dari investor domestik maupun asing. Sasaran ini juga mencerminkan komitmen untuk menjaga iklim investasi yang kondusif melalui reformasi regulasi, digitalisasi layanan perizinan, dan fasilitasi investasi langsung yang efisien.

Peningkatan investasi diarahkan pada sektor-sektor prioritas, seperti industri pengolahan, energi terbarukan, infrastruktur, serta ekonomi hijau dan digital, sehingga investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berdampak secara kualitatif terhadap perekonomian nasional.

PMA merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Nilai Realisasi PMA dan PMDN merupakan turunan dari Prioritas Nasional Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diamanatkan kepada Menko Perekonomian sebagai koordinator dalam meningkatkan investasi yang kemudian diturunkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Leader dari nilai realisasi PMA dan PMDN tetap berada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Peran Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah melakukan pengawalan dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung ketercapaian realisasi Nilai PMA dan PMDN di Bidang Hilirisasi.

Formula pengukuran:

Nilai PMA = Ekuitas Asing + Pinjaman Luar Negeri + Reinvestasi Laba Asing

Nilai PMDN = Ekuitas Domestik + Pinjaman Dalam Negeri + Reinvestasi Laba Domestik

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RPJMN Tahun 2025-2029 serta Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Jangka Menengah 2025-2029. Adapun target Triwulan II sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Nilai Realisasi PMA dan PMDN yang telah terealisasi kumulatif sebesar Rp 942,9 Triliun atau mencapai 49,5% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| IKU-2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN | Triliun (Rupiah) | Rp 1.905,6 Triliun | Rp 942,9 Triliun | 49,5% |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------|

Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Investasi/BKPM, capaian realisasi investasi pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan kinerja positif dengan total realisasi sebesar Rp 477,7 triliun yang artinya secara kumulatif sebesar Rp 942,9 Triliun. Angka ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 202,2 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 275,5 triliun.

Dari sisi wilayah, lima besar lokasi realisasi investasi tercatat berada di:

1. Jawa Barat sebesar Rp 72,5 triliun,
2. DKI Jakarta sebesar Rp 71,1 triliun,
3. Jawa Timur sebesar Rp 38,6 triliun,
4. Sulawesi Tengah sebesar Rp 31,6 triliun, dan
5. Banten sebesar Rp 29,7 triliun.

Jika dilihat dari subsektor, realisasi investasi Triwulan II 2025 didorong oleh lima subsektor utama PMA, yaitu:

1. Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar USD 3,6 Miliar,
2. Pertambangan sebesar USD 1,3 Miliar,
3. Jasa Lainnya sebesar USD 0,7 Miliar,
4. Industri Kimia dan Farmasi sebesar USD 0,7 Miliar, dan
5. Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar USD 0,6 Miliar.

Kemudian untuk lima subsektor pendukung realisasi PMDN meliputi:

1. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp 35,3 Triliun,
2. Pertambangan sebesar Rp 33,5 Triliun,
3. Perdagangan dan Reparasi sebesar Rp 32,2 Triliun,
4. Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp 27,6 Triliun, dan
5. Jasa lainnya sebesar Rp 27,0 Triliun

Sementara itu, dari sisi negara asal investasi asing, realisasi PMA didominasi oleh a) Singapura sebesar USD 4,2 miliar; b) Hongkong sebesar USD 2,3 miliar; c) RRT (Tiongkok) sebesar USD 1,8 miliar; d) Amerika Serikat sebesar USD 0,8 miliar; dan e) Malaysia sebesar USD 0,7 miliar.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, hilirisasi industri, serta peningkatan promosi investasi di sektor strategis dan berkelanjutan, sehingga realisasi investasi ke depan dapat semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

| 2.1 Nilai Realisasi PMA dan PMDN | | | |
|----------------------------------|--|------------|--|
| No | Rencana Aksi TW I | Status | Keterangan |
| 1. | Rapat koordinasi evaluasi capaian nilai hilirisasi komoditas strategis TW II | Terlaksana | <p>1. Telah dilaksanakannya rapat koordinasi dan sinkronisasi pengembangan hilirisasi komoditas strategis bersama Bappenas dalam rangka mendukung target peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi pada tanggal 25 Juli 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, Gd. Pos Lantai 6, dengan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional.</p> <p>2. Telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat terkait capaian investasi dan potensi hilirisasi strategis di Provinsi Jawa Barat.</p> <p>3. Telah dilaksanakan serangkaian rapat terkait revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan monitoring pelaksanaan Survei *Business Ready Indonesia (B-Ready)*.
2. Membangun *prototype for a Generative AI-based investment assistant* untuk membantu penyediaan informasi dan komunikasi dengan calon investor.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Reviu atas rencana aksi survei B-Ready topik *Business Entry, Business Location, labor, Taxation, Dispute Resolution, dan Business Insolvency*.
2. Pembaharuan database pada *AI-based investment assistant* dengan menambahkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 163.912.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya serta pelaksanaan urgensi perjalanan dinas luar negeri pimpinan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yakni efisiensi anggaran yang menghambat beberapa kegiatan koordinasi dan monitoring hilirisasi komoditas strategis kelapa, antara lain menghadiri acara groundbreaking pembangunan pabrik PT. Green Power Palembang di Palembang, Sumatera Selatan yang akan mengolah kelapa non standar menjadi Crude Coconut Oil, serta pelaksanaan monitoring pengolahan komoditas rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adanya dengan tetap melaksanakan kegiatan koordinasi dan monitoring hilirisasi komoditas strategis secara online/daring dengan memanfaatkan teknologi media zoom meeting.

3

Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh indikator kinerja Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tingkat Efektivitas
Kerja Sama Ekonomi
Internasional melalui
Jumlah Komitmen, Nilai
Perdagangan dan
Investasi**

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi internasional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama ekonomi yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama ekonomi yang dimaksud mencakup perjanjian kerja sama ekonomi internasional termasuk di sektor perdagangan dan investasi di bawah

pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama ekonomi dan investasi. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi dengan negara mitra utama yang menghasilkan komitmen konkret, serta mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi.

Adapun efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini didukung dengan melalui berbagai kerja sama dengan negara mitra Indonesia dan lembaga, koordinasi dengan K/L terkait, dan memanfaatkan hasil dari kesepakatan dan perjanjian. Komitmen kerja sama ekonomi dilakukan melalui kesepakatan pada forum yang diketuai dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun perundingan yang dilakukan dan/atau disepakati oleh K/L lain di bawah pengendalian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga meliputi kesepakatan hasil pembahasan, perundingan, dan secara khusus dapat berupa persetujuan atau perjanjian dalam bentuk FTA/PTA/CEPA, bilateral, regional dan sub regional, serta multilateral maupun review dan upgrading perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dilaksanakan juga tindak lanjut berupa implementasi hasil kesepakatan, perjanjian, dan program atau proyek yang telah disepakati.

IKU ini juga mencerminkan sejauh mana sebuah negara atau organisasi internasional berhasil dalam mencapai tujuan kerjasama ekonomi melalui berbagai kebijakan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Komitmen dalam konteks kerja sama ekonomi internasional dapat melalui bentuk perjanjian, kontrak, atau kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih, serta organisasi internasional. Beberapa kebijakan dan tindak lanjut yang mendukung tercapainya jumlah komitmen antara lain berupa kebijakan diplomasi ekonomi yang proaktif, pembentukan atau pembaruan perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau perjanjian investasi internasional (IIAs), serta tindak lanjut komitmen realisasi program atau proyek yang telah disepakati.

Formula pengukuran:

Efektivitas kerja sama ekonomi internasional ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen utama dengan pembobotan sebagai berikut:

1. Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Mitra Indonesia (80%)

Komponen ini mengukur jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati antara Indonesia dan negara mitra, yang mencerminkan bentuk kerja sama ekonomi internasional. Komitmen tersebut diperoleh melalui kesepakatan dalam berbagai forum kerja sama ekonomi, diplomasi ekonomi, business matching, maupun proyek serta bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian bersama K/L terkait. Komponen ini dibobotkan sebesar 80% karena pelaksanaan proses kerja sama ekonomi merupakan tugas dan fungsi pokok dari Deputi 2.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar 41 Komitmen.

2. Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai ekspor (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi komponen ini adalah perolehan nilai perdagangan dari Januari - Oktober tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Perdagangan dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 177,3 Miliar (catatan: Target Nilai Perdagangan periode Jan-Okt 2025 sebesar USD 147,7 Miliar, dihitung secara proporsional)

Perhitungan target berdasarkan Total nilai Rata-rata perdagangan 5 tahun terakhir dengan data diolah berdasarkan data dari website Kementerian Perdagangan.

3. Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia (10%)

Komponen ini mengukur nilai investasi yang terealisasi (dalam mata uang USD) dengan negara Mitra Indonesia. Realisasi dari nilai investasi ini diperoleh dari nilai investasi dari Januari - September tahun berjalan. Komponen ini dibobotkan sebesar 10% karena sub komponen dimaksud bukan hanya dikontribusikan oleh Kemenko Perekonomian namun merupakan upaya kolektif berbagai pihak, K/L terkait, asosiasi, dan dunia usaha.

Target Nilai Investasi dengan Negara Mitra Indonesia Tahun 2025 sebesar USD 32,29 Miliar (Target Nilai Investasi periode Jan-Sep 2025 sebesar USD 24,22 Miliar)

Sehingga realisasi IKU Efektivitas kerja sama ekonomi internasional diperoleh dari penjumlahan bobot atas capaian 3 komponen diatas.

$$\text{Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional} = 80\% \times \frac{(\text{Realisasi} \sum \text{Komitmen KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target} \sum \text{Komitmen KSEB+KSER+KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi} \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target} \sum \text{Nilai Perdagangan KSEB+KSER+KSEM})} + 10\% \times \frac{(\text{Realisasi} \sum \text{Nilai Investasi KSEB+KSER+KSEM})}{(\text{Target} \sum \text{Nilai Investasi KSEB+KSER+KSEM})}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada elaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif serta pada dokumen Perencanaan Kinerja Deputi Tahun 2025.. Adapun target Triwulan II sebesar N/A.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Nilai Realisasi Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan, dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 45% atau mencapai 55,4% dari target Tahun 2025 sebesar 82% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|--|--------|--------|-----------|-----------|
| IKU-3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi | Persen | 82% | 45% | 55,4% |

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi terdiri jumlah komitmen kerja sama ekonomi internasional dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 80%, nilai perdagangan dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%, dan nilai investasi dengan negara mitra Indonesia dengan bobot sebesar 10%.

Hingga triwulan II, jumlah kumulatif komitmen yang telah terealisasi sebanyak 13 dari target 41 komitmen sebagai berikut:

1. Penandatanganan MoU terkait Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinite Learning, Innov8 dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Pelaksanaan Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang.
3. Penandatanganan Lol PLTA Kayan.
4. Penandatanganan Lol RI-Vietnam on Capacity Building Cooperation in the Field of Engineering and Digital Economy.
5. Pertemuan ke-6 Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGTII) RI-Rusia.
6. Board Meeting Prospera I Tahun 2025.
7. Penandatanganan MoU antara Indonesia-China dalam rangka kerja sama pengembangan Twin Cities pada tanggal 25 Mei 2025.
8. Penandatanganan MoU Kerja sama Indonesia- China dalam rangka pengembangan supply chain pada tanggal 25 Mei 2025.
9. Penyelenggaraan Forum Bisnis Indonesia-Prancis pada tanggal 28 Mei 2025 dan menghasilkan 10 MoU di forum bisnis dengan nilai komitmen investasi mencapai USD 10 miliar.
10. Penandatanganan Joint Statement on Conclusion of Indonesia-EAEU FTA pada rangkaian Forum SPIEF 2025 pada tanggal 19 Juni 2025.
11. Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 Indonesia-Rusia pada tanggal 15 April 2025.
12. Joint Leaders to Retreat dalam forum Senior Official Meeting 6WG Indonesia-Singapura pada tanggal 23 Mei 2025 dan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting pada tanggal 16 Juni 2025.

13. Pelaksanaan Cybersecurity Symposium dan Workshop dalam kerangka kerja sama dengan RMIT Australia, Infinite Learning dan Innov8 pada 16-17 Juni 2025.

Adapun untuk nilai perdagangan dan nilai investasi, realisasi triwulan II didorong oleh tingginya aktivitas ekspor dan impor dengan negara mitra utama pada sektor prioritas. Nilai perdagangan Indonesia dengan negara mitra telah mencapai USD 188,59 miliar dari target USD 177,3 miliar. Namun hingga saat laporan ini disusun, belum terdapat data yang realisasi investasi pada periode Januari sampai dengan Juni 2025. Sehingga masih menggunakan realisasi triwulan I sebesar USD 10,29 miliar dari target USD 32,3 miliar.

Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian tingkat efektivitas kerja sama ekonomi internasional melalui jumlah komitmen, nilai perdagangan dan investasi pada triwulan III tahun 2025 diperkirakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

| 3.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Internasional melalui Jumlah Komitmen, Nilai Perdagangan dan Investasi | | | |
|---|--|------------|---|
| No | Rencana Aksi TW II | Status | Keterangan |
| 1. | Melaksanakan komitmen kerja sama ekonomi bilateral, regional, dan multilateral | Terlaksana | <ol style="list-style-type: none">Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI-Rusia bidang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknis pada tanggal 15 April 2025 dan telah disepakati beberapa komitmen kerja sama yang tercantum dalam agreed minutes.Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan tingkat tinggi RI-Singapura dengan disepakatinya Joint Report Leaders to Retreat dalam dorum Senior Official Meeting 6WG RI-Singapura |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pada tanggal 23 Mei 2025 dan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting pada tanggal 16 Juni 2025.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Telah dilaksanakan penyelenggaraan Forum Bisnis Indonesia-Prancis pada tanggal 28 Mei 2025 dan menghasilkan 10 MoU di forum bisnis dengan nilai komitmen investasi mencapai USD 10 miliar serta pertemuan Menko Perekonomian RI dengan Menteri Ekonomi Prancis. 4. Telah dilakukan penandatanganan MoU antara Indonesia-China dalam rangka kerja sama pengembangan Twin Cities pada tanggal 25 Mei 2025 antara Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan RRT. MoU ini merupakan salah satu deliverables kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia menandai semakin eratnya kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi, antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 5. Telah dilakukan penandatanganan MoU kerja sama RI-China |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|--|------------------|---|
| | | | <p>dalam rangka pengembangan supply chain pada tanggal 25 Mei 2025 antara Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan RRT. MoU ini merupakan salah satu deliverables kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia menandai semakin eratnya kerja sama strategis, khususnya di bidang ekonomi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).</p> <p>6. Telah dilaksanakan Cybersecurity Symposium dan Workshop dalam kerangka kerja sama pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinite Learning dan Innov8 pada tanggal 16-17 Juni 2025.</p> <p>7. Telah dilaksanakan penandatanganan Joint Statement on Conclusion of Indonesia-EAEU FTA pada rangkaian Forum SPIEF 2025 pada tanggal 19 Juni 2025 sebagai pengumuman telah diselesaikannya secara substansial Perundingan Perjanjian Indonesia-EAEU FTA.</p> |
| 2. | Menganalisa potensi ekspor melalui pengumpulan dan pengolahan data perdagangan | Belum terlaksana | |

| | | | |
|----|--|------------------|--|
| | internasional Indonesia dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan II | | |
| 3. | Menganalisa potensi investasi dengan negara mitra serta pengendalian terhadap hasil-hasil komitmen kerja sama bilateral pada triwulan II | Belum terlaksana | |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perundingan Pertama Perdagangan Resiprokal RI-AS pada tanggal April – Juni 2025.
2. Pertemuan Menko Perekonomian dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa terkait Penyelesaian Perundingan IEU –CEPA pada tanggal 6 Juni 2025.
3. Pertemuan Menko Perekonomian dengan Menteri Perdaganganan EEC pada tanggal 29 Mei 2025 untuk membahas percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-EAEU FTA.
4. Sosialisasi Tarif Resiprokal AS kepada Pelaku Usaha dan Asosiasi pada tangga 7 April 2025.
5. Pertemuan Menko dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat pada tanggal 14 April 2025.
6. Pertemuan Menko dentgan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi pada 17 April 2025.
7. Pertemuan Menko dengan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Virginia Barat pada 1 April 2025.
8. Pertemuan Menko dengan Federasi Industri Korea pada 29 April 2025.
9. Rapat Persipan Pertemuan dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat pada 9 Mei 2025.
10. Rapat Koordinasi Perkembangan STM di Indonesia pada 16 Mei 2025.
11. Senior Official Dialogue STM pada 20 Mei 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan pertemuan secara virtual menggunakan zoom meeting dengan pihak Singapura dalam pelaksanaan Pertemuan SOM Six Working Group RI-Singapura serta melakukan pertemuan-pertemuan lainnya di dalam kantor sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 140.376.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan perundingan dengan AS dalam pembahasan tarif resiprokal AS yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam RAB Tahun 2025 dan yang akan dilakukan pada TW III-IV.

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kerja sama ekonomi dan investasi.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi adalah:

4. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang meliputi:
 - a. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun Kesepakatan Bilateral
 - b. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Bilateral yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - c. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Bilateral di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
5. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang meliputi:
 - a. Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA

- b. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - c. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
- 6. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang meliputi:
 - a. Rekomendasi kebijakan proses penyusunan Initial Memorandum yang mencakup penyusunan narasi posisi Indonesia atas instrumen OECD, harmonisasi substansi pada komite, dan tindak lanjut hasil reviu Sekretariat Tim Nasional OECD
 - b. Rekomendasi kebijakan yang mencakup perumusan posisi Indonesia dalam isu-isu strategis global, konsolidasi substansi lintas K/L, dan tindak lanjut atas hasil pertemuan pada forum Sherpa Track G20.
- 7. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Investasi dan Hilirisasi yang meliputi rekomendasi kebijakan kemudahan berinvestasi dan akselerasi hilirisasi.
- 8. Sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang meliputi:
 - a. Pelaporan secara berkala terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)
 - b. Perkembangan ekonomi global dan domestik
 - c. Prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator internal bussiness yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting).

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif

program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektifitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD1 \times SKP\ AD2 \times SKP\ AD3 \times SKP\ AD4 \times SKP\ AD5}$$

Nilai Akhir Indeks efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100

Efektif (3), rentang nilai 81 - 90

Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80

Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan II sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 49,5 (1 dari 4) atau mencapai 33,3% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---|--------|----------|-----------|-----------|
| IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | Indeks | 3 dari 4 | 1 dari 4 | 33,3% |

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi terdiri dari nilai efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan seluruh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, sebagai berikut:

$$\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[5]{51x40x66,7x40x50} = 49,5$$

Nilai efektivitas 49,5 masuk dalam kategori 1 dari 4, di mana nilainya masih di bawah dari 70. Hal tersebut dikarenakan realisasi nilai efektivitas tersebut bersifat proses dan akumulasi dari triwulan I-IV.

Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Indeks efektivitas meliputi penyelesaian komitmen, partisipasi dalam forum, dan implementasi kebijakan kerja sama ekonomi dengan negara mitra Indonesia. Tiga tahap proses yang telah tercapai sebagai berikut identifikasi isu kerja sama ekonomi, koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L dan pelaku usaha, serta formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan.

Adapun kegiatan yang telah tercapai, antara lain:

Triwulan I

1. Penyelesaian kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun kesepakatan kerja sama ekonomi internasional, sebagai berikut:
 - Kesepakatan melalui MoU terkait Pengembangan SDM on Cybersecurity dengan RMIT Australia, Infinite Learning, Innov8 dan Kemenko Perekonominan.

- Kesepakatan melalui MoU between Indonesia-Vietnam on Capacity Building Cooperation in Field of Engineering and Digital Economy oleh Menko Perekonomian RI dan Menteri Perindustrian Vietnam.
 - Kesepakatan MoU PLTA Kayan.
2. Kesepakatan di forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, sebagai berikut:
- Kesepakatan pada Forum Public-Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 ke-3 Indonesia-Jepang yang menghasilkan Joint Media Statement PPDT 1.5 RI-Jepang
 - Kesepakatan pada Pertemuan ke-6 Working Group on Trade, Industry, and Investment (WGTII) RI-Rusia yang menghasilkan Protocol WGTII ke-6 RI-Rusia.
 - Kesepakatan pada Forum Board Meeting Prospera I Tahun 2025 yang menghasilkan Minutes of Meeting.

Selain capaian di atas, terdapat capaian Kerja sama ekonomi lainnya yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan I yakni:

1. Kesepakatan dalam Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan dan Industri India dalam Kunjungan Kerja Menko di sela-sela Kunjungan Presiden ke India ada tanggal 23 s.d 27 Januari 2025. Pertemuan membahas berbagai isu strategis termasuk upaya penyelesaian permasalahan dan kendala teknis, khususnya yang terkait dengan perdagangan, industri, dan investasi.
2. Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Investasi UAE, Menteri Ekonomi UAE, dan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE dalam Kunjungan Kerja Menko di sela-sela Forum World Government Summit (WGS 2025) di Dubai pada tanggal 11 s.d 12 Februari 2025.

Triwulan II

1. Penyelesaian kesepakatan PTA/FTA/CEPA maupun kesepakatan kerja sama ekonomi internasional, sebagai berikut:
 - Kesepakatan kerja sama Indonesia-RRT melalui penandatanganan MoU antara Indonesia-China dalam rangka kerja sama pengembangan Twin Cities pada tanggal 25 Mei 2025.
 - Kesepakatan kerja sama Indonesia-RRT melalui penandatanganan MoU kerja sama RI-China dalam rangka pengembangan supply chain pada tanggal 25 Mei 2025.
 - Kesepakatan kerja sama bilateral RI-Prancis melalui penyelenggaraan Forum Bisnis Indonesia-Prancis pada tanggal 28 Mei 2025 dan menghasilkan 10 MoU di forum bisnis dengan nilai komitmen investasi mencapai USD 10 miliar serta pertemuan bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Prancis.

- Kesepakatan kerja sama Indonesia-EAEU FTA melalui penandatanganan Joint Statement on Conclusion of Indonesia-EAEU FTA pada rangkaian Forum SPIEF 2025 pada tanggal 19 Juni 2025.
2. Kesepakatan di forum kerja sama ekonomi internasional yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, sebagai berikut:
 - Kesepakatan kerja sama pada rangkaian pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI-Rusia pada tanggal 15 April 2025.
 - Kesepakatan kerja sama pada rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi RI-Singapura dalam forum Senior Official Meeting 6WG RI-Singapura pada tanggal 23 Mei 2025 dan The 15th Indonesia-Singapore Six Bilateral Economic Working Groups Ministerial Meeting pada tanggal 16 Juni 2025.
3. Implementasi kerja sama ekonomi internasional di bawah pengendalian Kemenko Perekonomian, sebagai berikut;
 - Pelaksanaan Cybersecurity Symposium dan Workshop dalam kerangka kerja sama dengan RMIT Australia, Infinite Learning dan Innov8 pada tanggal 16-17 Juni 2025 sebagai tindak lanjut dari MoU Pengembangan SDM terhadap Keamanan Siber dengan RMIT Australia, Infinite Learning, dan Innov8.

Selain capaian di atas, terdapat capaian kerja sama ekonomi lainnya yang telah terlaksana sampai dengan Triwulan II yakni:

1. Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Beberapa Pejabat Tinggi AS yaitu Ambassador Greer, United States Trade Representative (USTR), United States Secretary of Commerce Howard Lutnick, dan United States Secretary of Commerce Howard Lutnick, Secretary of Treasury, dalam rangka membahas upaya langkah negosiasi kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) pada bulan April 2025
2. Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) dan Menteri Revitalisasi Ekonomi Jepang dalam Kunjungan Kerja Menko disela-sela Acara Penerimaan Penghargaan dan Bilateral di Jepang pada tanggal 8-9 Mei 2025.

Berdasarkan capaian di atas serta kegiatan yang telah dilaksanakan, proyeksi capaian indeks efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kerja sama ekonomi dan investasi pada triwulan III tahun 2025 diperkirakan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperkuat sinergi program, menyelesaikan permasalahan yang menghambat, dan menentukan tindak lanjut antar K/L.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

| No | Rencana Aksi TW II | Status | Keterangan |
|-----------|--|---------------|---|
| 1. | Penyelesaian komitmen kerja sama ekonomi internasional | Terlaksana | <p>1. Menutup pertemuan SKB ke-13, Menko Airlangga dan DPM Manturov menandatangani Agreed Minutes SKB ke RI-Rusia yang telah disepakati kedua negara sebagai deliverables kesepakatan Kerja sama RI-Rusia dalam kerangka Pertemuan SKB ke-13 RI-Rusia pada tanggal 15 April 2025. Lebih lanjut, kedua co-chairs juga mengumumkan sejumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani kedua pihak, yakni MoU between Halal Product Assurance Organization Agency of Halal Product Assurance Organizing Agency of Indonesia and the Federal Service for Accreditation of the Russian Federation on Cooperation in Halal Product Assurance, MoU antara Federasi Bulutangkis Nasional Rusia dan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia tentang Kerja Sama di Bidang Olahraga, Agreement on Cooperation in the Field of Quality and Business Excellence Development antara RusQuality dengan Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI), serta MoU on Cooperation between Far East and Arctic Development Corporation JSC and Indonesian Chamber of Commerce and Industry.</p> <p>2. Menko Perekonomian bersama menteri pendamping lainnya dari Kabinet Merah Putih turut mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam dan Perdana</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pertemuan membahas perkembangan hubungan bilateral kedua negara khususnya melalui investasi di berbagai sektor strategis meliputi kawasan industri, logistik, konektivitas, pusat data dan energi terbarukan |
| 2. | Melakukan identifikasi kendala dalam penguatan dan/atau perluasan kerja sama ekonomi dan investasi | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan rapat awal bersama Kementerian Luar Negeri membahas deliverables kunjungan Presiden Prancis ke Indonesia pada tanggal 16 dan 30 April 2025. 2. Telah dilaksanakan rapat persiapan Pelaksanaan Forum Bisnis RI-Prancis dengan KL terkait bersama KADIN pada tanggal 6 Mei dan 16 Mei 2025. 3. Telah dilaksanakan rapat bersama Kelu dan KL terkait untuk membahas persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prancis ke Indonesia tanggal 21, 22, dan 23 Mei 2025. 4. Telah dilaksanakan Pertemuan Bilateral Menko Perekonomian RI dengan Meneteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri Prancis, dan dilanjutkan dengan Penyelenggaraan Forum Bisnis RI-Prancis pada tanggal 28 Mei 2025. 5. Telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pertemuan Walk-Throught Text Persetujuan Perdagangan Resiprokal RI-AS bersama K/L pada tanggal 9 Mei 2025. 6. Telah dilaksanakan Pertemuan Walk-Through RI-AS bersama K/L dengan USTR pada tanggal 13-14 Mei 2025. 7. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penawaran Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Resiprokal dengan AS bersama K/L pada tanggal 2 Juni 2025. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>8. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Second Best Offer Indonesia dalam Perundingan Perdagangan Resiprokal dengan AS bersama K/L pada tanggal 20 Juni 2025.</p> <p>9. Telah dilaksanakan Pertemuan awal Menko Perekonomian dan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi EU pada tanggal 5 Februari 2025 dalam rangka mengidentifikasi isu-isu yang masih pending dalam perundingan IEU-CEPA. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta jaring masukan dengan KADIN dalam rangka mengidentifikasi isu-isu pending IEU-CEPA untuk dapat menambah masukan posisi Pemerintah Indonesia. Deputi II juga telah melakukan pertemuan di tingkat Dubes EU dan CN IEU-CEPA untuk membahas pending-pending isu tersebut pada tanggal 28 Februari 2025.</p> <p>10. Telah dilaksanakan Rakortas Menko pada tanggal 2 Mei 2025 dalam rangka membahas beberapa pending isu perundingan IEU-CEPA serta menyiapkan posisi offer Pemri untuk pertemuan dengan Komisioner Perdagangan EU.</p> <p>11. Telah dilaksanakan Pertemuan Menko Perekonomian dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi EU pada tanggal 6 Juni 2025 di Brussels untuk membahas percepatan penyelesaian negosiasi Perjanjian IEU-CEPA. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa hal penting yakni antara lain mengenai status IEU-CEPA yang sudah mencapai penyelesaian tahap akhir yakni sekitar lebih dari</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>90% text drafting, dengan beberapa isu teknis di tingkat Chief Negotiators dan Working Groups.</p> <p>12. Pertemuan dengan Economic Counselor Kedubes RRT pada tanggal 16 Januari 2025 untuk membahas keberlanjutan executing agency dan tindak lanjut kerja sama kedepan. Lebih lanjut juga telah dilakukan Rapat Tindak Lanjut pada tanggal 30 Januari 2025, telah disepakati untuk dilakukan perubahan MoU tentang Proyek Kerja Sama Kawasan Kembar Dua Ngegara (TCTP) yang sebelumnya ditangani oleh Kemenko Marves.</p> <p>13. Tim teknis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan MOFCOM telah melakukan menyepakati konsep MoU yang masing-masing akan ditandatangani oleh kedua pihak. MoU on Two Countries Twin Parks Cooperation Project ditandatangani oleh Menko Perekonomian, MOFCOM, dan Gubernur Provinsi Rakyat Fujian.</p> <p>14. Telah dilaksanakan penyampaian masukan deliverables dari Deputi II Kemenko Perekonomian sebagai Bahan Pertemuan Bilateral Tingkat Tinggi RI-RRT melalui surat tertanggal 8 Mei 2025 kepada Kementerian Luar Negeri. Surat tersebut telah disampaikan terkait progress update mengenai MoU antara Indonesia-China dalam rangka kerja sama pengembangan Twin Cities yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.</p> <p>15. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan dengan Kemlu dan KL terkait pada tanggal 19 Mei 2025 dalam rangka persiapan Kunjungan Premier RRT ke</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Indonesia pada akhir Mei 2025 dengan salah satu pembahasannya mengenai Perkembangan Proyek Kerja Sama Two Countries Twin Parks (TCTP).</p> <p>16. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan konsep MoU antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRT untuk Rantai Pasokan dan Rantai Industri pada tanggal 24 April 2025.</p> <p>17. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Konsep MoU on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chains antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025. Rapat Koordinasi dilakukan untuk melakukan diskusi dan menjaring masukan dari masing-masing instansi terkait Konsep MoU yang telah disampaikan oleh Kedutaan RRT yang ada di Jakarta.</p> <p>18. Telah dilaksanakan penyampaian masukan deliverables dari Deputi II Kemenko Perekonomian sebagai Bahan Pertemuan Bilateral Tingkat Tinggi RI-RRT melalui surat tertanggal 8 Mei 2025 kepada Kementerian Luar Negeri. Surat tersebut telah disampaikan terkait progress update mengenai MoU antara Indonesia-China dalam rangka kerja sama pengembangan Twin Cities yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian.</p> <p>19. Tim teknis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan MOFCOM telah menyepakati konsep MoU on Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain yang akan ditanda tangan pada saat</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>kunjungan kerja PM Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia pada tanggal 24-25 Mei 2025.</p> <p>20. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri dalam rangka identifikasi pending isu dan perkembangan perundingan Indonesia-EAEU FTA melalui Surat tanggal 8 Mei 2025.</p> <p>21. Telah dilaksanakan Pertemuan Menko Perekonomian RI dengan Menteri Perdagangan Eurasian Economic Commision (EEC) pada tanggal 29 Mei 2025. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU), sekaligus menindaklanjuti proses perundingan Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (I-EAEU FTA). Kedua menteri berkomitmen bahwa perundingan dapat diselesaikan pada tahun ini, mengingat sebagian besar isu utama telah disepakati dan proses kini berada pada tahap finalisasi.</p> <p>22. Telah dilakukan Pertemuan lanjutan antara Menko Perekonomian dengan Mendag EEC di sela-sela acara mendampingi Presiden menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) pada 20 Juni 2025, yang menghasilkan penandatanganan Joint Statement mengenai penyelesaian secara substansial dari Perundingan I-EAEU FTA.</p> <p>23. Telah dilaksanakan pengidentifikasi isu-isu kerja sama RI-Rusia untuk Agreed Minutes SKB RI-Rusia melalui Surat permohonan masukan ke K/L terkait yang menjadi pengampu working group dibawah koordinasi SKB RI-Rusia melalui surat tertanggal 20 Maret 2025.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>24. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perkembangan Kelompok Kerja (Working Group) dibawah SKB RI-Rusia pada tanggal 19 Maret 2025 serta Rapat Koordinasi Pembahasan Agreed Minutes SKB ke-13 RI-Rusia pada tanggal 26 Maret 2025 serta Pertemuan Finalisasi Draft Agreed Minutes SKB ke-13 RI-Rusia dengan pihak Rusia pada tanggal 8 April 2025. Rangkaian kegiatan ini dilakukan dalam rangka membahas Agreed Minutes yang dapat disepakati bersama oleh Kedua Co-Chairs pada Pertemuan SKB RI-Rusia.</p> <p>25. Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Rangkaian Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 RI-Rusia pada tanggal 15 April 2025 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian RI bersama Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov.</p> <p>26. Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Pertemuan 6 WG RI-Singapura tingkat Eselon I (SOM) dan tingkat Menteri (MM) dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 guna melakukan diskusi dan penajaman atas perkembangan isu dari setiap Working Group termasuk rencana kegiatan ke depan, yang selanjutnya akan menjadi laporan pada Pertemuan SOM dimaksud.</p> <p>27. Jaring masukan dari unit kerja terkait di dapatkan ketika Rapat Koordinasi yang telah terlaksana pada tanggal 21 Mei 2025</p> <p>28. Tahun 2025 Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi Tuan Rumah/host pada pelaksanaan the 13th Senior Official Meeting (SOM) 6 WG Indonesia-Singapore yang diselenggarakan pada 6 Mei 2025 di Jakarta. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kemenko Ekon yang</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>bertindak sebagai Chairman Indonesia, sementara Chairman Singapura adalah Permanent Secretary, the Ministry of Trade and Industry, Singapore. Pertemuan juga dihadiri Pejabat setingkat Eselon I dan II dari K/L terkait baik dari sisi Indonesia maupun dari sisi Singapura. Adapun agenda pertemuan adalah sebagai berikut: ® Pertemuan Bilateral SOM RI-Singapura, yang akan dihadiri oleh Ketua Delegasi RI dan Singapura serta Delegasi terbatas dari kedua negara yang ® Plenary Session the 13th Senior Official Meeting 6 WG RI-Singapura, yang akan dihadiri oleh 6 Ketua WG serta seluruh Delegasi Indonesia dan Delegasi Singapura</p> <p>29. Pertemuan 6WG MM ke-15 diawali Pertemuan Bilateral antara Menko Perekonomian dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Gan Kim Yong, dilanjutkan dengan pertemuan 6 WG bersama perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) masing-masing negara. Adapun Pokja dalam 6WG MM adalah (i) Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (ii) Investasi; (iii) Ketenagakerjaan; (iv) Perhubungan; (v) Agribisnis; dan (vi) Pariwisata.</p> <p>30. Telah dilaksanakan review atas Proposal Cyber Security Concept Note terkait Rencana Penyelenggaraan Symposium Cybersecurity dengan internal Kemenko Perekonomian pada tanggal 20 Maret 2025</p> <p>31. Telah dilaksanakan rangkaian Pertemuan Rapat Persiapan Cybersecurity Symposium dan Workshop bersama RMIT Australia, Innov8, dan Infinite Learning pada periode bulan Mei 2025 s.d Juni 2025 untuk membahas event execution, marketing hingga materi kegiatan.</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 32. Telah dilaksanakan Indonesia-Australia Cybersecurity Symposium dan Workshop pada tanggal 16-17 Juni 2025 di Jakarta. Kegiatan ini bekerja sama dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), PT Kinema Systrans Multimedia (Infinite Learning-Nongsa Digital Park), PT Innoeight Technofarm Indonesia (Innov8). Acara ini turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Southeast Asia and Pacific Cyber Program. Kegiatan ini juga merupakan implementasi konkret dari Komitmen antara Indonesia-Australia melalui penandatanganan MoU Cybersecurity. |
|--|--|--|--|

5

Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Sasaran program ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang mencakup: (a) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\
 &\quad + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\
 &\quad + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} \\
 &\quad + \text{Indeks Kepuasan Layanan Asdep}) \\
 &\quad / 5
 \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan II sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|--|--------|----------|-----------|-----------|
| IKU-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | Indeks | 3 dari 4 | 3 dari 4 | 100 % |

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

| 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | | | |
|---|--------------------|--------|------------|
| No | Rencana Aksi TW II | Status | Keterangan |

| | | | |
|----|---|------------|--|
| 1. | Melaksanakan koordinasi dengan seluruh asisten deputi untuk pelaksanaan survei kepuasan kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi semester I | Terlaksana | Telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Asisten Deputi dalam rangka permintaan pengisian survei kepada K/L dan stakeholder terkait selama triwulan II. |
| 2. | Menyusun laporan hasil pelaksanaan survei kualitas layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan investasi semester I | Terlaksana | Telah dilakukan penyusunan hasil survei dari seluruh Asisten Deputi. |

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja seperti pelaksanaan reminder secara berkala kepada seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI, memanfaatkan kembali kertas yang tidak terpakai seperti untuk penempelan bukti dukung perjalanan dinas,

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, belum terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025 terlaksana dengan baik dan diharapkan pada triwulan selanjutnya target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

6

Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Percentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

Latar Belakang

Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Percentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2025 sebesar 100% penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025. Adapun target Triwulan II sebesar 100%.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang telah terealisasi sebesar 40% atau mencapai 47,1% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | % Kinerja |
|---|--------|--------|-----------|-----------|
| IKU-6.1 Percentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | Persen | 85% | 40% | 47,1% |

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

| No | Rencana Aksi TW II | Status | Keterangan |
|----|--|------------|--|
| 1. | Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II | Terlaksana | Telah dilaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja dengan batas waktu tanggal 8 Agustus 2025 |
| 2. | Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI | Terlaksana | Telah dilakukan secara rutin selama triwulan II tahun 2025 |

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya perjalanan dinas yang dibayarkan at cost, rapat dilaksanakan secara online/daring melalui media zoom meeting, mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan naskah dinas melalui penggunaan SRIKANDI.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Terhambatnya optimalisasi penggunaan SRIKANDI. Pada aplikasi SRIKANDI seringkali sulit diakses atau sulit untuk dilakukan penandatangan sehingga proses persuratan terhambat.

Selain itu juga adanya efisiensi anggaran yang membuat beberapa kegiatan yang mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi menjadi tidak terlaksana seperti pelaksanaan Benchmarking Reformasi Birokrasi ke Instansi yang telah berhasil dalam implementasi praktik baik Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan:

Manfaatkan Whatsapp sebagai perantara koordinasi dengan para PIC untuk penyampaian surat/nota dinas kepada pihak terkait dan melakukan back up data persuratan secara luring.

Melaksanakan Benchmarking Reformasi Birokrasi ke Instansi yang telah berhasil dalam implementasi praktik baik Reformasi Birokrasi secara daring.

Jakarta, 14 Juli 2025

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi